

BAB II

KONDISI POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1945-1949

2.1 Kondisi Politik Indonesia Tahun 1945-1949

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Secara politis, pernyataan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan mengelola negara mereka sendiri. Indonesia mengumumkan kemerdekaannya dan bercita-cita untuk membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera setelah bebas dari penjajahan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia menghadapi banyak masalah politik setelah mendapatkan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, fokus utama kegiatan politik Indonesia adalah pengakuan kedaulatan dan perbaikan keadaan negara. Kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia belum stabil pada awal kemerdekaan. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh beberapa peristiwa penting yaitu kedatangan Sekutu dan NICA di Indonesia, pindahnya ibu kota ke Yogyakarta, Agresi Militer Belanda, hingga perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2.1.1 Kedatangan Sekutu dan NICA di Indonesia

Kekuasaan Jepang di Indonesia secara hukum berakhir sejak Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 10 September, Jepang

menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Sekutu, bukan Indonesia. Pada tanggal 14 September, Mayor Greenhalgh, perwira Sekutu pertama, tiba di Jakarta untuk memantau kondisi sebelum kedatangan pasukan Sekutu. Pada 29 September 1945, pasukan Sekutu mendarat di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tugas ini dijalankan oleh *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letjen Philip Christison.²⁴ Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah menerima penyerahan kekuasaan dari pihak Indonesia, membebaskan tawanan perang dan interniran mereka, melucuti serta memulangkan tentara Jepang, memulihkan keamanan dan ketertiban, serta mencari dan mengadili penjahat perang.

AFNEI bertugas di Sumatera dan Jawa. Semula rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, sikap rakyat berubah setelah diketahui mereka membawa NICA, yang ingin menguasai kembali Indonesia. Ketegangan meningkat saat NICA mempersenjatai kembali bekas anggota Koninklijk Netherlands Indies Leger (KNIL) yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia, yang memicu terjadinya provokasi dan teror. Akibatnya pecahlah berbagai pertempuran di daerah.²⁵

Pertempuran ini membangkitkan semangat antikolonialisme rakyat Indonesia. Perasaan dendam sebagai akibat pengalaman pahit di masa lampau, tiba-tiba meledak mencari sasaran luapan balas dendam dalam bentuk aksi

²⁴ Daru Wijayanti, *Sejarah Pasca Kemerdekaan Indonesia*. 2019. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, hlm. 2

²⁵ Anwar Kurnia. 2011, *IPS Terpadu 3*. Jakarta: Yudhistira, hlm. 25

kekerasan yang tidak terkendali seperti Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan lain-lain.

2.1.2 Pindahannya Ibu Kota ke Yogyakarta

Pemerintah tidak menyelenggarakan sidang khusus untuk mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946. Pemerintah mengambil keputusan yang sangat mendesak tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya tindakan teror yang dilakukan oleh militer Belanda. Pemerintah Republik Indonesia memaknai kepindahan tersebut sebagai protes dingin terhadap Sekutu, karena saat itu mereka sedang menjalankan politik untuk menghindari timbulnya peperangan.²⁶ Kepindahan ini dilakukan karena tentara Sekutu menggunakan banyak gedung umum di Jakarta, dan pemerintah Republik Indonesia tidak dapat bertindak dengan bebas.

Yogyakarta dengan cepat menarik banyak karyawan dari berbagai perusahaan. Pemerintah juga mulai kembali menyatukan masyarakat melalui demokratisasi dan reorganisasi pemerintahan yang mendukung gerakan rakyat.²⁷ Sejak saat itu, pemerintah menetapkan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia selama masa revolusi. Meskipun Ibu Kota dipindahkan ke Yogyakarta, gangguan keamanan dari Belanda tetap berlanjut. Memanfaatkan situasi Republik Indonesia yang tidak stabil, Belanda melancarkan serangan mendadak pada 19 Desember 1948 dan berhasil merebut Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden, serta

²⁶ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*. 1991. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), hlm. 50

²⁷ Kartodirdjo, dkk, *Negara dan Nasionalisme Indonesia*. 1995. Jakarta: Grasindo, hlm. 75

beberapa menteri dan pejabat tinggi kemudian ditawan dan diasingkan ke Bangka, Sumatera Utara.²⁸

2.1.3 Agresi Militer Belanda ke Republik Indonesia

a. Agresi Militer Belanda Pertama

Agresi Militer Belanda Pertama, yang berlangsung pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, merupakan operasi militer di Jawa dan Sumatera dengan kode “Operatie Product”. Agresi ini melanggar Persetujuan Linggajati.²⁹ Pelanggaran ini mencerminkan ketidakkonsistenan Belanda dalam menjalankan komitmen diplomatik yang telah disepakati sebelumnya bersama Republik Indonesia. Dalam Persetujuan Linggarjati, Belanda telah mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatra, dan Madura, serta sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalan damai dan kerja sama dalam membentuk negara federasi Republik Indonesia Serikat.³⁰ Namun, dengan diluncurkannya Agresi Militer I, Belanda justru menggunakan kekuatan militer untuk merebut wilayah-wilayah yang telah diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang bertentangan dengan semangat perundingan dan prinsip penyelesaian damai.

Di bawah pimpinan Letjen Simon Spoor, Belanda dengan cepat menguasai Jakarta serta kota-kota penting di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Agresi Militer Pertama ini berlangsung tanpa hambatan berarti bagi Belanda. Agresi Militer Belanda Pertama mendapat kecaman internasional,

²⁸ Kansil, S.T dan Juliant, *Sedjarah Perdjuaan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. 1972. Jakarta: Erlangga, hlm. 52

²⁹ Wibisono. 2023, *Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Cerdas Interaktif, hlm. 29

³⁰ *Ibid*, hlm. 40.

mendorong India dan Australia membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB. PBB menyetujui usulan penghentian konflik dan mengeluarkan Resolusi No. 27 pada 1 Agustus 1947. Tiga hari kemudian, Indonesia dan Belanda menyepakati gencatan senjata, sehingga Agresi Militer Belanda Pertama berakhir pada 4 Agustus 1947.

b. Agresi Militer Belanda Kedua

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer Kedua dibawah pimpinan Dr. Bell. Dengan taktik perang kilat berhasil menyerang semua front di daerah Republik Indonesia.³¹ Mereka terlebih dahulu menyerang pangkalan udara Maguwo dengan pasukan lintas udara sebelum mengalihkan target ke Yogyakarta, ibu kota RI dengan membombardir infrastruktur dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta pejabat lainnya. Soekarno dipindahkan ke Prapat lalu ke Bangka, sementara Hatta langsung ditawan di Bangka. Belanda lalu menyebarkan propaganda bahwa RI telah runtuh dan TNI tidak berdaya, menyudutkan posisi Indonesia di mata internasional.

Agresi Militer Belanda kedua mendapat kecaman internasional karena Belanda dianggap mengganggu perdamaian dan melanggar perjanjian Renville tentang kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang membatasi wilayah Republik secara de facto dan mempertegas garis pemisah kekuasaan pasca Agresi Militer Belanda Pertama. Pada 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan operasi militer Belanda dan gerilya Republik.³² Belanda harus kembali ke meja perundingan karena kegagalannya

³¹ *Ibid*, hlm. 32

³² *Ibid*, hlm. 34

dalam perang dan ancaman Amerika Serikat untuk memutuskan hubungan ekonomi dan keuangan.

2.1.4 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

a. Perang Gerilya

Sekutu mengusulkan gencatan senjata yang disepakati lewat Perundingan Linggajati pada November 1946 dan ditandatangani Maret 1947. Namun, Republik curiga karena Inggris menyerahkan wilayah ke Belanda. Para pemimpin RI pun bersiap menghadapi serangan. Kecurigaan terbukti saat Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama pada 21 Juli 1947. Persenjataan terbatas, pasukan Republik beralih ke taktik gerilya untuk melawan.³³ Akhir 1947, strategi gerilya Republik makin efektif, menyulitkan Belanda yang hanya menguasai kota besar dan jalur utama. Sementara itu, Indonesia mencari dukungan internasional. PBB memerintahkan gencatan senjata dan membentuk KTN yang memfasilitasi Perundingan Renville pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948.

Pasukan TNI hijrah ke Yogyakarta dan meninggalkan wilayah gerilya sejak 1 Februari 1948 untuk mematuhi Perjanjian Renville. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh DI/TII di Jawa Barat dan PKI di Jawa Timur untuk merebut kekuasaan, membuat TNI menghadapi dua ancaman. Gencatan senjata dimanfaatkan untuk konsolidasi, namun hijrah memperberat logistik. Pengalaman agresi sebelumnya mendorong dilakukannya rekonstruksi dan rasionalisasi besar-besaran, dikenal sebagai "Re-Ra",³⁴ yang pada intinya Program Re-Ra bertujuan memperkuat TNI

³³ Anwar Kurnia, *op.cit*, hlm. 32

³⁴ *Ibid*, hlm. 33.

dengan merampingkan jumlah pasukan, mengelompokkan ulang divisi-divisi yang tidak aktif, serta mempererat hubungan antara TNI dan rakyat guna menciptakan angkatan perang yang lebih efektif, efisien, dan siap bergerak.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer Kedua. Meski sakit, Jenderal Soedirman memimpin gerilya di Jawa, membuat Belanda kewalahan. Tekanan internasional memaksa Belanda berunding, tapi Soedirman tetap mengingatkan komandan untuk waspada. Pasukan Belanda menekan Surakarta, memicu serangan TNI. Perlawanan gerilya pun terus berlanjut meski perundingan berlangsung. Posisi Belanda semakin terdesak, hingga mereka meninggalkan Yogyakarta pada 29 Juni 1949. TNI segera mengambil alih kota Yogyakarta, sementara para pemimpin RI kembali pada 6 dan 10 Juli 1949. Peristiwa ini menunjukkan keberhasilan Indonesia.

b. Serangan Umum

Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan puncak serangan TNI yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, setelah mendengar kabar dari beberapa siaran radio Voice of America, BBC, dan ABC, bahwa Dewan Keamanan PBB akan membahas masalah Indonesia pada Maret 1949. Ia mengusulkan serangan untuk menarik perhatian dunia.³⁵ Setelah mendapat restu Jenderal Soedirman, ia berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Kedua tokoh sepakat merencanakan serangan umum terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yang dipimpin oleh Kolonel van Langen.

³⁵ Anwar Kurnia, *op.cit*, hlm. 35.

Serangan umum dimulai pukul 06.00 saat sirine jam malam berakhir, membuat Belanda terkejut dan tak siap. Dalam enam jam, tentara Republik menguasai Yogyakarta dan memukul mundur pasukan Belanda. Berita serangan segera disebarkan ke PDRI dan luar negeri lewat radio Wonosobo sebelum pemancar dihancurkan. Pukul 12.00, pasukan Republik mundur, dan bala bantuan Belanda datang saat kota telah kosong.

c. Konferensi Meja Bundar

Belanda menduduki Yogyakarta, lalu pasukan Republik meningkatkan perlawanan, termasuk melancarkan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil menguasai kota selama enam jam. Peristiwa ini mendorong Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan pada 14 April 1949 yang dipimpin oleh Mohammad Roem dan Dr. J. H. van Royen. Kedua pihak menyepakati Persetujuan Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Inti dari Persetujuan Roem-Royen adalah Pemerintah Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam memulihkan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, Indonesia juga bersedia berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan secara nyata, penuh, dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat.³⁶

Presiden Soekarno dan para pejabat lainnya kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Gencatan senjata dengan Belanda disepakati pada 1 Agustus 1949. Delegasi Republik yang dipimpin Mohammad Hatta dan delegasi *Bijeenkomst voor*

³⁶ George McTurnant Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. 1995. Surakarta: UNS Press, hlm. 536.

Federaal Overleg (BFO) yang dipimpin Sultan Hamid menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 September 1949, bersama delegasi Belanda dan perwakilan PBB. Pada 2 November 1949, persetujuan KMB tercapai dengan bantuan komisi PBB.³⁷ Persetujuan ini disahkan oleh Republik melalui Undang-undang No.10 Tahun 1949 pada 14 Desember 1949.³⁸ Hasil pokok dari KMB, antara lain:

1. Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949.
2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda selama satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
3. Antara kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda.
4. Seluruh pasukan Belanda akan ditarik keluar RIS.
5. RIS akan membentuk Angkatan Perang RIS (APRIS), di mana TNI sebagai intinya.³⁹

Republik Indonesia Serikat (RIS) hanya bertahan kurang dari satu tahun karena dianggap bertentangan dengan semangat persatuan dan hasil politik adu domba Belanda. Akibat tuntutan rakyat, RIS dibubarkan dan pada 17 Agustus 1950 dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2 Kondisi Ekonomi Indonesia Tahun 1945-1949

Kondisi politik Indonesia tahun 1945-1949 bukan hanya menciptakan tantangan dalam bidang pertahanan dan diplomasi, tetapi juga memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi. Indonesia menghadapi tantangan ekonomi setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Struktur pemerintahan dan

³⁷ Oey Beng To, *op.cit*, hlm. 13

³⁸ Lembaga Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1949 Tentang Hal penerimaan hasil-hasil baik Konperensi Meja Bundar*. Tersedia di <https://www.peraturanbpk.go.id> diakses pada 24 Mei 2025.

³⁹ Endang Witanti, *Proklamasi Kemerdekaan*, 2017. Yogyakarta: Istana Media, hlm. 121

ekonomi belum stabil, sementara sebagian besar aset ekonomi masih dikuasai oleh pihak asing.

Ketidakstabilan ini diperparah oleh agresi militer Belanda yang dilancarkan pada tahun 1947 dan 1948. Agresi tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, seperti produksi dan distribusi barang, serta menutup akses ekspor dan impor melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang dikuasai Belanda. Selain itu, Belanda juga menerapkan blokade ekonomi terhadap wilayah Republik, yang menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan berkurangnya devisa negara, sehingga mendorong inflasi yang tinggi.

2.2.1 Inflasi

Inflasi terjadi akibat kelangkaan barang kebutuhan masyarakat dan peningkatan uang beredar yang tidak terkendali.⁴⁰ Kelangkaan barang disebabkan oleh turunnya kapasitas produksi, terganggunya kegiatan ekonomi, dan terhentinya ekspor-impor. Sementara itu, peningkatan uang beredar berasal dari pencetakan uang oleh Republik untuk menutup defisit anggaran demi memenuhi kebutuhan pemerintahan dan perjuangan. Pada masa itu, beredar berbagai jenis mata uang secara bersamaan, termasuk uang Republik dari pusat dan daerah, sisa uang Jepang, serta uang De Javasche Bank, masing-masing dengan nilai berbeda.⁴¹ Akibatnya, pemerintah kesulitan mengendalikan inflasi.

⁴⁰ Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*. 2016. Bandung: Mizan, hlm. 73

⁴¹ Harsono Kuncoro, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. 2021. Jakarta: Bumi Aksara

Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia belum menguasai seluruh wilayah, sehingga pengawasan terhadap peredaran uang menjadi lemah akibat penggunaan berbagai mata uang. Kondisi ekonomi yang buruk serta kebutuhan dana untuk perang dan pemerintahan mendorong pencetakan uang besar-besaran tanpa dukungan cadangan emas atau devisa. Nilai uang yang terus menurun membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap uang kertas dan cenderung segera membelanjakannya, sehingga inflasi semakin cepat. Perang kemerdekaan, ketidakstabilan politik, dan pergantian kekuasaan memperburuk situasi, membuat kebijakan ekonomi sulit diterapkan dan lembaga pengumpul pendapatan negara tidak berfungsi. Untuk mengatasi masalah inflasi ini, pemerintah memberikan upaya solusi yaitu:

a. Kebijakan Pinjaman Nasional

Kekosongan kas negara menjadi salah satu penyebab inflasi besar pada awal kemerdekaan. Untuk mengatasinya, Menteri Keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan “pinjaman nasional” senilai Rp1.000.000.000 yang disetujui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dan dibagi dalam dua tahap, dengan jangka pengembalian 40 tahun. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari rakyat, terbukti dari terkumpulnya Rp500.000.000 melalui Bank Tabungan Pos dan pegadaian. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.⁴²

⁴² Anwar Kurnia, *op.cit.* hlm. 60

b. Pembentukan Bank Negara Indonesia

Bank Negara Indonesia (BNI) resmi dibuka pada 17 Agustus 1946 sebagai upaya negara mengatasi masalah keuangan setelah setahun berdiri tanpa otoritas moneter. Menurut Mohammad Hatta, pendirian bank negara merupakan tugas mendesak. BNI dibentuk untuk mengoordinasikan bidang ekonomi-keuangan dan mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing.⁴³

c. Penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI)

Penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) menjadi solusi penting bagi pemerintah pasca kemerdekaan untuk menggantikan mata uang asing, menegaskan kedaulatan, dan mengendalikan ekonomi. ORI berfungsi sebagai alat tukar resmi, simbol kemandirian politik-ekonomi, serta upaya menstabilkan harga dan membangun sistem keuangan nasional. Penggunaannya juga mencerminkan dukungan rakyat terhadap Republik dan penolakan terhadap pengaruh ekonomi Belanda.

2.2.2 Blokade Ekonomi

Sejak November 1945, terjadi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda untuk memutus perdagangan luar negeri Indonesia. Blokade tersebut juga akan menutup pintu perdagangan Indonesia dan menghambat ekspor barang-barang Indonesia. Belanda memberlakukan blokade karena: (1) mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia agar kekuatan militer Indonesia tidak bertambah; (2) menghentikan ekspor hasil perkebunan yang dimiliki Belanda dan

⁴³ Kusuma, E, dkk, *Uang Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. 2021. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 131

perusahaan asing lainnya di Indonesia; (3) mengendalikan aktivitas orang asing di Indonesia agar tidak membahayakan kepentingan Belanda.⁴⁴

Hasil pertanian senilai sekitar 200 juta rupiah sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun jumlah barang ekspor sangat terbatas. Upaya ekspor pun terhambat oleh blokade laut ketat dari Belanda, yang dimulai sejak November 1945.⁴⁵ Blokade Belanda menyebabkan ekspor-impor terganggu, barang ekspor dibumihanguskan, dan barang impor sulit masuk. Dampaknya, kas negara kosong, pendapatan pajak dan bea masuk menurun tajam, sementara pengeluaran pemerintah jauh melebihi pemasukan. Pemerintah hanya mengandalkan produksi pertanian, dan berkat dukungan petani, RI tetap bertahan meski kondisi ekonomi sangat buruk. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah sebagai upaya mengatasi permasalahan blokade ekonomi, yaitu:

a. Melakukan Diplomasi Beras

Pemerintah Indonesia berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan menarik perhatian internasional dan mengakhiri isolasi ekonomi. Dukungan produksi petani, khususnya beras, memungkinkan pemerintah melakukan diplomasi beras ke India yang dilanda kelaparan, dengan mengirimkan 500.000 ton beras berharga murah.

Indonesia menggunakan jalur diplomasi dan perwakilan di luar negeri serta pengiriman bantuan melalui negara ketiga, misalnya lewat pelabuhan atau negara ketiga yang tidak berada di bawah kontrol Belanda seperti Pelabuhan Rangoon,

⁴⁴ Poesponegoro dan Notosusanto, *op.cit*, hlm. 273

⁴⁵ Sumitro Djojohadikusumo, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*. 1953. Jakarta: Indira, hlm.

Myanmar, Pelabuhan Singapura, Thailan, dan Sri Lanka. Sebagai imbalan atas diplomasi beras, India berjanji mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Secara politik, Indonesia mendapat dukungan kuat dari India di forum internasional, serta peluang impor barang-barang penting terbuka melalui hubungan dagang kedua negara.⁴⁶

b. Membentuk *Banking and Trading Corporation* (BTC)

Blokade Belanda menyebabkan kesulitan impor dan ekspor, sehingga pendapatan negara menurun. Untuk mengatasinya, pemerintah bersama Bank Negara Indonesia mendirikan badan pusat jual beli bernama *Banking and Trading Corporation* (BTC). *Bank Trading Corporation* adalah sebuah lembaga keuangan milik pemerintah Indonesia yang didirikan setelah kemerdekaan dengan tujuan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di bidang perdagangan. BTC berfungsi sebagai bank dagang yang memberikan kredit dan pembiayaan kepada pengusaha nasional, terutama pengusaha pribumi, agar mereka bisa bersaing dalam sektor perdagangan yang saat itu masih didominasi oleh pengusaha asing.

Pemerintah Indonesia melalui BTC menjalankan perdagangan sistem barter dengan mengekspor hasil bumi rakyat ke luar negeri. Melalui sistem ini, Indonesia berhasil memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dari luar negeri. BTC juga menjalin kerja sama dagang dengan perusahaan swasta Amerika, Isbrantsen Inc.,

⁴⁶ Poesponegoro dan Notosusanto, *op.cit*, hlm. 276.

yang membeli komoditas ekspor Indonesia seperti gula, karet, dan teh, sementara Indonesia mengimpor barang dari Amerika, seperti alat transportasi.⁴⁷

Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Tahun 1945-1949 dapat dianalisis melalui pendekatan teori nasionalisme dan teori kedaulatan. ekonomi Teori nasionalisme menjelaskan bagaimana semangat kebangsaan dan rasa persatuan menjadi pendorong utama perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada masa ini, nasionalisme tercermin dalam tekad berbagai elemen bangsa baik dari kalangan pemerintah, militer, maupun rakyat sipil untuk mempertahankan identitas dan integritas nasional dari ancaman kolonial Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan merupakan perwujudan nyata dari teori kedaulatan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara yang merdeka secara politik harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola sistem ekonominya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kebijakan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan, seperti penerbitan ORI, pendirian BNI, Pinjaman Nasional, dan perlawanan terhadap blokade ekonomi Belanda, merupakan wujud nyata dari teori kedaulatan ekonomi. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan dan perdagangan, membangun sistem ekonomi tanpa ketergantungan pada pihak asing, serta menegaskan kemerdekaan secara utuh, baik secara politik maupun ekonomi.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 277.